

Wapres Ingatkan Para Menteri Agar Tetap Fokus Bekerja

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengingatkan para menteri agar fokus bekerja dan tidak meninggalkan pekerjaan.

Hal ini disampaikannya untuk merespons isu yang menyebut bahwa menteri-menteri Jokowi-Ma'ruf Amin mulai fokus pada Pemilu 2024.

"Belum (ada menteri yang kampanye), yang penting seperti Presiden bilang, fokus pekerjaan, tetap fokus, itu jangan tinggalkan pekerjaan, makasih," tegas Wapres saat Konferensi Pers di Istana Wakil Presiden, Kamis (12/5).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk fokus menyelesaikan tugasnya masing-masing. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberikan pengantar pada

sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5) lalu.

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai pertengahan tahun ini. Saya minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," ucap Presiden.

Hal ini dilakukan agar berbagai agenda strategis nasional yang menjadi prioritas bersama dapat terselenggara dengan baik. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan.

"Agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik. Pemilu terselenggara dengan baik, lancar dan tanpa gangguan," ucapnya. ● **han**

Sayembara Tangkap Maling Sawit Berhadiah Jutaan Rupiah di Kalteng

KOTIM (IM) - Para petani sawit di Kalimantan Tengah resah akibat maraknya pencurian buah sawit dari perkebunan. Hal ini dikeluhkan sejumlah petani sawit yang tergabung dalam koperasi produsen Dayak Misik, Desa Pundia, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng.

Para petani kian resah sehingga mengadakan sayembara untuk menangkap maling sawit. Spanduk pengumuman secara terbuka sayembara menangkap maling sawit diletakkan di tempat umum. Foto spanduk sayembara itu pun viral di media sosial.

Pengurus Koperasi Produsen Dayak Misik, Dansyah mengatakan, sejak harga buah kelapa sawit naik, aksi pencurian di lapangan kian marak. Sehingga tidak terkendali lagi dan mengakibatkan mereka mengalami kerugian besar.

Maka dari itu mereka membuat pengumuman secara terbuka terkait sa-

sayembara tersebut. Siapa saja yang bisa menangkap pelaku pencurian akan diberi hadiah.

Penangkapan pelaku pada malam hari akan diberi upah Rp3 juta dan siang hari Rp2 juta. Penangkapan harus disertai barang bukti tandan buah segar atau brondolan, alat panen dan barang bukti lainnya.

"Bagi siapa saja yang ingin bekerja sama dengan kami silakan, tangkap pelaku curi sawit hadiahnya kami serahkan," ujar Dansyah, Kamis (12/5).

Selain itu juga ada bonus tambahan dari bendahara sebesar Rp3 juta manakala pelaku bisa ditangkap.

Menurutnya, para pelaku sudah disrahsang hingga cara semacam ini harus mereka tempuh, dengan harapan pelaku bisa ditangkap.

"Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan, hari ini sawit di areal plasma kami yang dicuri, kedepan bisa saja milik masyarakat pribadi, ke mana lagi mengadu jika tidak kita lawan," ucapnya. ● **osm**

BNPT Duga Penyerang Aparat di Papua Generasi Ketiga OPM

JAKARTA (IM) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus mengalami regenerasi.

"Anggota KKB saat ini sedang mengalami fase regenerasi," kata Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam akun Instagram @BNPTRI dilansir, Kamis (12/5).

Untuk saat ini, kata Boy, kelompok KKB yang kerap melakukan penyerangan kepada masyarakat maupun aparat yang bertugas, adalah generasi ketiga dari para pendahulu kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Mereka yang sering melancarkan serangan kepada aparat dan warga sipil dalam dua tahun terakhir merupakan

generasi ketiga dari dedengkot kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka," ujar Boy.

Menurut Boy, anggota maupun pemimpin KKB generasi sekarang dalam konteks kemandirian, jelas lebih unggul di antara masyarakat biasa serta didorong dengan ideologi anti-NKRI yang kuat.

Tak hanya itu, dalam Instagram tersebut, Boy menyebut bahwa, KKB pada dasarnya tidak banyak, namun, terpisah-pisah.

Berdasarkan investigasi, kata Boy, anggota KKB daksir tidak mencapai lebih dari seribu orang.

Kemudian, empat kabupaten yang menjadi lokasi berkumpulnya kelompok KKB, yakni, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Puncak, dan Nduga. ● **mei**

Jaksa Kembali Berkas Penyidikan Kasus Doni Salmanan

JAKARTA (IM) - Jaksa mengembalikan berkas penyidik kasus dugaan penipuan Aplikasi Quotex dengan tersangka Doni Salmanan ke pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana mengungkapkan, berkas itu dikembalikan karena dinilai belum lengkap oleh Jaksa Peneliti.

"Tim Jaksa Peneliti berpendapat bahwa berkas perkara atas nama tersangka DS belum lengkap secara formal dan materil, sebagaimana diatur dalam KUHAP prapenuntutan ini diatur dalam Pasal 14 huruf b," kata Ketut kepada awak media, Jakarta, Kamis (12/5).

Sebagaimana diketahui, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri merampungkan berkas penyidi-

kan kasus dugaan penipuan Aplikasi Quotex dengan tersangka Doni Salmanan, pada 18 April 2022.

Doni Salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penipuan opsi biner atau trading binary option lewat Platform Quotex. Doni ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan lebih dari 13 jam.

Doni Salmanan akan dikenakan pasal berlipis yakni Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE ancamannya 6 tahun penjara. Kemudian Pasal 378 KUHP ancaman penjara 4 tahun, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun penjara. ● **han**

Polhukam

FOTO/ANT



Kinerja Para Penjabat Gubernur akan Dievaluasi 3 Bulan Sekali

Mendagri lantik 5 Pj gubernur, yaitu Pj Gubernur Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Papua Barat.

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kinerja para pejabat (Pj) Gubernur yang dilantik pada Kamis (12/5) akan dievaluasi 3 bulan sekali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Tiga bulan sekali sesuai UU. Dari situ kita lakukan evaluasi. Apakah performancenya bagus atau tidak," ujar Tito kepada wartawan, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5).

Tito juga menegaskan bah-

wa Pj gubernur yang terpilih sudah melewati mekanisme penjurangan dari para tokoh masyarakat dan kementerian lembaga terkait.

"Saya sampaikan bahwa yang terpilih ini sudah melalui mekanisme penjurangan dari kementerian lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat," kata Tito.

Sebagai informasi, 5 Pj gubernur telah dilantik, yaitu untuk provinsi Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Mantan Hakim Agung Tegaskan Putusan MA Final dan Mengikat

JAKARTA (IM) - Mantan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Mohammad Laica Marzuki menegaskan putusan Mahkamah Agung (MA) bersifat final dan mengikat.

"Keputusan MA adalah yang tertinggi. Maka, putusannya bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain atas putusan MA," kata Mohammad Laica Marzuki di Jakarta, Kamis (12/5).

Hal ini disampaikannya menanggapi polemik putusan MA terkait dengan jaminan penyediaan dan pemberian vaksin halal.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan harus menjalankan perintah putusan MA tersebut dengan sepenuhnya. Tidak boleh ada dalih atau alasan apa pun untuk mengabaikan ataupun menunda pelaksanaan putusan tersebut, terutama kewajiban menyediakan dan memberikan vaksin halal bagi umat Islam di Indonesia.

"Putusan MA harus dijalankan secara tidak kepalang tanggung. Dia bukan bersifat rekomendasi," ujarnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa Indonesia tidak lagi berada dalam kondisi darurat dalam merespons pandemi Covid-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi.

"Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi darurat dalam merespons pandemi Covid-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Konferensi Pers, beberapa waktu

lalu.

Wiku mengatakan, bahwa kondisi tersebut telah tercermin pada menurunnya besar efek Covid-19, seperti menurunnya jumlah kasus positif, kasus aktif, keterisian rumah sakit, dan angka kematian, termasuk terhadap perilaku sosial ataupun ekonomi di tengah masyarakat saat ini.

"Masyarakat juga diharapkan bisa hidup berdampingan dengan Covid-19 seperti melakukan pembatasan aktivitas. Namun, pada saat yang bersamaan mendorong terbentuknya perilaku yang lebih sehat dan aman," katanya.

Sebelumnya, dalam amar putusan Nomor 31 P/HUM/2022 Mahkamah Agung RI menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penediaan Vaksin dan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No-

mor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

"Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019/ Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia," bunyi salinan putusan MA itu.

Selain itu MA menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia." ● **han**

Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5).

Tito pun yakin dengan kapabilitas yang dimiliki oleh Paulus Waterpauw dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, khususnya terkait penolakan otonomi khusus jilid 2 dan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

"Kita juga tahu dia me-

PENGANUGERAHAN KSATRIA PADMA NUSANTARA

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) menari bersama pelawak Bali usai menerima Penganugerahan Ksatria Padma Nusantara yang digelar di KRI Surabaya-591 di perairan Bali, Kamis (12/5). Penganugerahan Ksatria Padma Nusantara yang diselenggarakan di KRI Surabaya-591 tersebut diberikan kepada Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono oleh tokoh Puri Ageng Blahbatuh atas dedikasi yang diamban Angkatan Laut untuk terus menjaga dan melindungi perairan Indonesia.

Posisi Penjabat Gubernur Rawan Digugat, Ini Kata Mendagri

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan soal penunjukan penjabat (pj) gubernur yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengisian pejabat kepala daerah sebelum melantik pejabat.

Menurut Tito, mekanisme penunjukan Pj untuk menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatan pada 2022-2023 bukan berada dalam amar putusan MK.

"Tapi di dalam pertimbangan. Keputusan sendiri itu untuk masalah masa jabatan itu sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016 yakni Pilkada pada November 2024," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Kamis (12/5).

"MK menyampaikan dalam bagian pertimbangan agar pemerintah memperhatikan dan memberi perhatian untuk membuat PP khusus penjabat yang bersifat demokratis dan transparan," lanjut Tito.

Dia menilai, soal demokratis tidak mungkin dengan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat atau melalui mekanisme DPRD.

Sebab jika demikian kondisi akan sama seperti pilkada

memiliki track record di sana, dia pernah menjadi Kapolda Papua, pernah jadi Kapolda Papua Barat sendiri dan yang penting Beliau putra Papua, orang asli Papua," kata Tito.

"Dengan segala pengalamannya, kemampuan akademik, jam terbang, kita harap bisa jaga stabilitas politik dan pertahanan di Papua," katanya.

● **han**

atau pemilihan.

"Tapi kita menjangkir aspirasi. Jadi kita tentukan dengan mekanisme, bukan satu orang, tapi melalui mekanisme sidang. Yang Bapak Presiden mendengarkan aspirasi, pendapat-pendapat dari menteri dan lembaga. Di mana tiap satu-satu dibahas. Kurangnya di mana, kerjanya bagaimana," papar Tito.

"Dan kemudian apa saja tantangan melaksanakan tugas. Semua dibahas di sana. Sehingga akhirnya terpelihlah ini. Saya kira saya cukup optimis dengan lima yang terpilih ini, karena kalau dilihat dari jam terbang mereka semua, pengalaman juga cukup," tegasnya.

Lebih lanjut Tito menjelaskan soal putusan MK yang menyertori larangan perwira aktif TNI/Polri menjabat sebagai pj kepala daerah. Dalam hal ini terkait dengan salah satu pj gubernur, yakni Paulus Waterpauw yang sebelumnya merupakan perwira aktif kepolisian.

"Pak Waterpauw kan udah pensiun, cuma alih status. Saya tidak melihat (putusan MK) itu bukan harus dipensiunkan maksudnya, tapi lebih kepada tidak menjadi pejabat aktif di institusinya," kata Tito. ● **han**

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 17 A
☎ : (0734) 421194 FAX : (0734) 421194 Kode Pos 31311
Website : <https://www.pn-muaraenim.go.id>
Email: pengadilannegrimuaraenim@gmail.com

RELAAS PANGGILAN SIDANG
No. 2/Pdt.P/2022/PN Mre

Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 saya Jimmy Oktavianus, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Negeri Muara Enim, atas perintah Hakim Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata No. 2/Pdt.P/2022/PN Mre

TELAH MEMANGGIL

Yudia Utama Zaini, tempat tanggal lahir Jakarta 20 Oktober 1961, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Komplek Rumah Tumbuh RT.03 RW.08 Kel. Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Prov. Sumatera Selatan.

Namun pada saat ini Yudia Utama Zaini tidak lagi dapat diketahui keberadaannya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia;

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri : Muara Enim;
Jalan : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim
Hari / Tanggal : Senin / 22 Agustus 2022;
Pukul : 09.00 WIB;

Untuk pemeriksaan perkara pemohonan yang diajukan oleh Welly Hartono, SH, Tasmia, SH, Abdi Persada Daim, SH, Agus Setiawan, SH, dan Rifi Antoni, SH, semuanya adalah Advokat-Pengacara dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan "LBHS" bertindak untuk dan atas nama Adia Turisna Binti Yudia Utama Zaini sebagai Pemohon I dan Naima Larasati Binti Yudia Utama Zaini sebagai Pemohon II;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua dan saya laksanakan melalui media agar ia datang menghadap pada persidangan tersebut diatas;

Jurusita,

Jimmy Oktavianus, A.Md.

drilchem
Wellbore Stability & Loss Control Experts
PT OBM DRILCHEM TBK

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT OBM DRILCHEM Tbk.

Direksi PT OBM DRILCHEM Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 7 Juni 2022
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Dipo Business Center Lantai 7
Jl. Gatot Subroto kav 50-52
Jakarta 10260

Mata Acara RUPS Tahunan :

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, rencana Kerja Perseroan untuk tahun buku 2022, serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquittal et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepala seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 guna disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba dilahan.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana IPO hingga 31 Desember 2021
- Persetujuan atas perubahan penetapan penggunaan dana hasil IPO Perseroan.

Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPST. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020.
- Pemegang Saham yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dalam rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 pukul 16.00 WIB.
- Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan akan melakukan RUPST secara Daring ("Online")

Jakarta, 13 Mei 2022
Direksi PT OBM DRILCHEM Tbk

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TUNAS INTERMODA SEJAHTERA Nomor 07, tanggal 25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh dua) dengan Nomor Penetapan Pemberitahuan Pembaruan Perseroan: AHU-AH.01.10.0015379, yang dibuat di hadapan YUNITA ELYSABETH NANGGOLAN, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Jakarta Utara (Perseroan), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- Memerikan dan menyetujui laporan pertanggungjawaban Likuidator atas tugasnya sehubungan dengan pembaruan (penyelesaian) Likuidasi Perseroan;
- Memerikan dan menyetujui tanggung jawab sepenuhnya (acquittal et de charge) kepada Likuidator Perseroan;
- Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban Likuidator tersebut, maka dengan ini Likuidator mengumumkan bahwa Perseroan tidak mempunyai tagihan-tagihan pada pihak lain dan/atau para kreditor.

Demikian Pengumuman ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.

Tim Likuidasi
PT TUNAS INTERMODA SEJAHTERA